# BAB VIII
# PENUTUP

Bagian ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan yang kemudian disusun secara komprehensif berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Lebih lanjut, bagian ini juga menjelaskan implikasi dari temuan penelitian, yaitu dalam bentuk pengembangan teoritis dan praktek yang memberikan wawasan intelektual dan paradigma sesuai kajian terkait. Rekomendasi yang diutarakan bermaksud memberikan ruang diskusi yang selaras bagi peneliti selanjutnya, sekaligus memberikan saran bagi akademisi selanjutnya dalam baik dalam bentuk komparatif maupun *tarjih* hukum terhadap kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Kendatipun penelitian ini telah cukup memberikan kontribusi dalam ranah intelektual akademisi tapi penelitian ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dari segi sumber dan literatur bacaan.

## 8.1. Kesimpulan

Kajian tentang nalar hukum Ahmad Khatib al-Minangkabawi tentang kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau menyimpulkan tiga hal, yaitu; pertama, Ahmad Khatib menggunakan otoritas nash QS. an-Nisa ayat 11-14 sebagai sumber hukum utama dan pedoman dalam hukum Islam dan hadis tentang anak perempuan Saad ibn Rabi' dijadikan sebagai *bayan* sekaligus asumsi dasar dalam melakukan kajian tentang hukum kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Pemahaman ini timbul dari *manthuq* nash al-qur'an dan sunnah kemudian ayat ini juga merupakan *nushush al-muqaddasah* (nash suci) yang bersifat *qath'i dalalah* dan *qath'i tsubut* sehingga tidak membuka sedikitpun celah ruang diskusi terhadap interpretasi makna lain. Oleh karena itu, Ahmad Khatib memahami bahwa kewarisan yang berlaku dan diakui dalam Islam hanyalah kewarisan berdasarkan *faraidh* maka kewarisan harta pusaka tinggi mesti sesuai dan berpedoman kepada *faraidh.*

Kedua, Ahmad Khatib dalam mengkaji kewarisan harta pusaka tinggi menggunakan metode *tathbiq al-nash 'ala waqi'* dengan menerapkan nash al-qur'an dan sunnah terhadap kewarisan harta pusaka tinggi. Melalui ayat ini Allah menegaskan untuk mengutamakan harta warisan kepada anak laki-laki dan

perempuan sesuai ketentuan *faraidh* dengan rasionalisasi kewarisan yang adil. Penerapan Al-qur'an dan sunnah terhadap harta pusaka tinggi menjadikan prilaku mewariskan harta pusaka tinggi menjadi *ghasab* dan konsekuensi hukuman dosa bagi para pelakunya karena mengerjakan larangan Allah yang bahkan jika tetap dipertahankan bisa berujung kepada kekafiran karena menentang hukum Allah.

Ketiga, Ahmad Khatib membangun nalar hukumnya dengan prinsip deduktif melalui nash al-qur'an dan sunnah sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa Ahmad Khatib menggunakan nalar *bayani* dengan menjelaskan aturan kewarisan dalam Islam dan memberlakukannya terhadap kewarisan harta pusaka tinggi. Penerapan al-qur'an dan sunnah terhadap harta pusaka tinggi menjadikan perilaku mewariskan harta pusaka tinggi menjadi *ghasab*. Dalam upaya penerapan hukum *faraidh* terhadap kewarisan harta pusaka tinggi Ahmad Khatib juga menggunakan nalar intuitif/ *'irfani* melalui nilai-nilai moral dan implikasi kewarisan harta pusaka tinggi baik secara personal maupun individual. Penggunaan nilai moral dan implikasinya dalam nalar hukumnya dijadikan sebagai bentuk korelasi syariat dengan akhlak, hal ini menunjukkan bahwa Ahmad Khatib mengkritik kewarisan harta pusaka tinggi bukan karena kepentingan pribadi melainkan tanggung jawab terhadap keilmuan yang dimiliki dan kasih sayang terhadap masyarakat Minangkabau agar menjalankan syariat secara sempurna.

Berdasarkan ketiga temuan di atas, maka penelitian ini menunjukkan bahwa Ahmad Khatib menggunakan nalar *bashirah* sebagai piranti fikiran dalam mengkaji kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Nalar *bashirah* yaitu kekuatan hati yang diterangi oleh cahaya suci sehingga bisa melihat hakikat dan batin sesuatu, sebagaimana penglihatan manusia yang melihat batin dan zahir sesuatu, yang dinamakan akal *nazhariyah* oleh para hakim. Melalui nalar *bayani* untuk membaca realita kewarisan harta pusaka tinggi yang diketahui melalui penggunaan metode *tathbiq al-nash 'ala waqi'* dengan tujuan menata kembali kewarisan harta pusaka tinggi sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan nalar intuitif/*'irfani* untuk memahami hukum Allah dengan kesucian jiwa dari perkara *syubhat* terutama kewarisan karena hal ini sangat berdampak kepada batin/kejiwaan seseorang, sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

UIN IMAM BONJOL
PADANG

menempatkan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial. Maka pemikiran Ahmad Khatib tidak hanya kritikan terhadap praktik sosial tetapi jauh lebih dalam Ahmad Khatib menyoroti aspek batin dalam suatu hukum, serta mempertegas bahwa dalam syariat Allah, tidak hanya sekedar tentang halal-haram namun juga tentang akhlak sebagai makhluk-Nya.

Pemahaman ini terwujud melalui pendekatan ushul fiqh mazhab syafi'i sebagai piranti pemikiran dalam mengkaji kewarisan harta pusaka tinggi di Minangkabau, yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman nash al-qur'an dan sunnah sebagai otoritas hukum tertinggi dalam hukum Islam. Hal ini menjadikan status hukum dan praktik kewarisan harta pusaka tinggi mesti diwariskan sesuai dengan *faraidh*.

## 8.2. Rekomendasi

8.2.1. Nalar hukum Haji Rasul tentang kewarisan harta pusaka tinggi

Kajian kewarisan harta pusaka tinggi telah banyak dilakukan oleh beberapa akademisi, dari penelitian yang ada kewarisan harta pusaka tinggi jika dikaji menurut hukum Islam mengerucut kepada dua hal, yaitu diwariskan sesuai *faraidh* dan dipertahankan sebagaimana adanya dengan mengqiyaskan kepada waqaf. Maka rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengkaji nalar hukum kewarisan harta pusaka tinggi melalui nalar *burhani* atau nalar *istishlahi* melalui qiyas yang dilakukan oleh Haji Rasul dengan lebih memfokuskan pada kajian ushul fiqh dan nalar hukum, karena dalam penetapan suatu hukum penting melihat bagaimana para yuris menggunakan piranti berfikir dalam mengkaji dan menetapkan suatu hukum. Setelahnya, penelitian ini bisa disandingkan dan dipertajam lagi melalui metode *tarjih* hukum dalam ushul fiqh.

8.2.2. Hukum kewarisan harta pusaka tinggi terhadap perempuan yang punah

Kewarisan harta pusaka tinggi diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan (ibu) melalui sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulunya. Karena kewarisan pusaka tinggi jika dikaji melalui kacamata hukum Islam hanya memiliki dua acuan yaitu waqaf dan faraidh. Lantas bagaimanakah jika perempuan yang mengelola harta pusaka tinggi tidak memiliki keturunan

perempuan yang akan mengestafetkan harta pusaka tinggi tersebut?. Dengan focus bagaimana mekanisme peralihan hak kewarisan terhadap harta pusaka tinggi, dan bagaimana status hukumnya?

## 8.3. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi pada teoritis dan praktis terhadap status hukum dan praktik hukum kewarisan harta pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau. Secara teoritis temuan ini menyoroti teori ushul fiqh dalam mengkaji penggunaan metode hukum yang memberikan pengaruh signifikan terhadap konklusi hukum. Karena kebenaran teori ushul fiqh dianggap benar setelah melakukan procedural ushul fiqh yang bisa dipertanggungjawabkan secara dalil, pemahaman, intelektual dan kepribadian mujtahid. Dalam hal yang saling berkaitan, nalar hukum sebagai piranti berfikir mencerminkan bagaimana hukum itu lahir dan kondisi sosial maupun budaya yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini dapat diketahui bagaimana ketajaman pemikiran seorang mujtahid dalam mengkaji sumber hukum dan menganalisanya sehingga lahirlah suatu konklusi hukum yang mampu diuji secara ilmiah melalui berbagai sudut pandang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada status hukum dan praktik hukum kewarisan harta pusaka tinggi yang menjadikan kewarisan harta pusaka tinggi menjadi haram dan para pelakunya dinilai telah melakukan tindakan *ghasab* terhadap hak *dzawil furudh*. Oleh karena itu, maka praktik kewarisan harta pusaka tinggi mesti direformasi dengan berpedoman kepada *faraidh* dan menegaskan kembali kepada para ulama serta tokoh adat dan anggota kaum untuk mengkaji ulang status harta kewarisan pusaka tinggi.

## 8.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan beberapa keterbatasan; *Pertama,* Ahmad Khatib tidak menyatakan terkait pembelajarannya mengenai adat Minangkabau sehingga menimbulkan pemahaman bahwa Ahmad Khatib terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan hukum kewarisan harta pusaka tinggi. *Kedua*, beberapa naskah tulisan Ahmad Khatib yang sulit dijumpai, sehingga menjadikan ruang lingkup kajian ini terbatas pada naskah literatur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA


’Abbad, I. I. (1972). *Al-Muhith fi al-Lughah*. ’alim al-kutub.

Abubakar, A. (2022). Otoritas Hukum Sunah sebagai Wahyu. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(1), 88–101.

Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. (1892). *ad-Da’i al-Masmu’*. al-Baabiy al-Halaabiy.

Ahsin, M. (2020). Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatîb Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ`Î Al-Masmû`. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 229.

Al-ghazali, A. H. (1993). *المستصفى*. Dar al-kutub al-’ilmiyah.

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfa*. Dar Kutub Ilmiyah.

Al-Ghazali, A. H. (1998). *المنخول*. dar al-fikr.

Al-Jabiri, M. A. (2014). *Formasi Nalar Arab*. IRCiSoD.

Al-Jauziyah, A. B. A. ibn Q. (2019). *Madarij as-Salikin fi Manazil al-Sairin*. Dar Ibn Hazm.

Al-Jurjani, A. (n.d.). *At-Ta’rifaat*. Dar al-Rayyan lil al-Turats.

Al-juwaini, A. malik ibn yusuf ibn muhammad. (1997). *البرهان في اصول الفقه*. Dar al-kutub al-’ilmiyah.

Al-Kasaniy, A. R. (1992). *Mu’jam Isthilahat al-Shufiyah*. Dar al-Manar.

Al-Minangkabawi, A. K. (1915). *Al-Qaulu at-Tahif: tarikh kehidupan Ahmad Khatib ibn Abd Lathif al-Minangkabawi al-Jawi*. Maktabah Makkah.

Al-Minangkabawi, A. K. (2021). *Al-Manhaj al-Masyru’*. Khazanah Fathaniyah.

Al-Qurthubi, S. (1964). *Tafsir al-Qurthubi: al-Jami’u li Ahkam al-Qur’an*. Dar al-kutub al-mishriyah.

Al-razi, A. abd allah ibn husain at-taymi. (1997). *المحصول*. Muassasah ar-Risalah.

Amsori. (2017). Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan. *Pakuan Law Review*, *3*, 33–55.

Angelia, Y. (2017). Merantau dalam Menuntut Ilmu. *Jurnal Living Hadis*, *2*(1), 67–82.

Ar-Rumi, A. R. ibn U. (2019). *Ayyuhal Akh Syarh Risalah Ayyuhal Walad*. Maktabah al-Tsaqafah al-Dinayah.


UIN IMAM BONJOL PADANG

As-subki, T. ad-din abd wahab ibn taqiy ad-dib. (1999). *رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب*. ’alim al-kutub.

As-subki, T. ad-din abd wahab ibn taqiy ad-din. (n.d.). *حاشية البناني على متن جمع الجوامع*.

Auda, J. (2015). *membumikan hukum islam melalui maqasid syariah*. PT Mizan Pustaka.

Azizah, F. P., Rahmat, S., Maijar, L., Alim Usman, A., & Zainal. (2022). Pembaharuan Islam Di Minangkabau pada Awal Abad XX. *Rusyidiah: Jurnal Pemikiran Islam*, *3*(2), 212–228.

Azzahrah, M. F. (2021). *Peralihan Harta Keluarga Muslim Singapura: Studi Penggunaan Nuzriah dan Hibah al-Ruqba dalam Kontrak Kepemilikan Bersama (Joint Tenancy)*.

BA, S. M., & Pangulu, A. M. R. (n.d.). *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*. Pustaka Indonesia.

Bahtiyar, A. (2019). *Pengaruh Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi Terhadap Dinamika Intelektual Islam Di Indonesia 1900-1947 M*.

Dr. Abdillah Mustari, M. A. (2013). *Hukum kewarisan islam*. Alauddin University Press.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Dr. H. Nasrun Haroen, M. . (1996). *Usul Fiqh*. Logos.

Dr. Maimun Nawawi, M. H. . (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.

Elfia. (2017). KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar bin Khattab). *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, *2*(2).

Fatahullah, Salat, M., Haeratun, & Jamaluddin. (2023). ANALISIS METODE PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA. *jurnal pepadu*, *4*(3), 392–401.

Fauzan. (2022). *Hukum kewarisan minangkabau menurut syekh ahmad khatib al-minangkabawi dan syekh abdul karim amrullah*. UIN Imam Bonjol Padang.

Fithoroini, D. (2022). *Epistemologi bayani dalam kajian ushul fiqh*. *2*(2), 1–17.

Fithri, W. (2019). Integrasi Keilmuan Dalam Pandangan Syech Ahmad Chatib Al

Minangkabawi. *TAJDID : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin*, *22*(1), 97–103. https://doi.org/10.15548/tajdid.v22i1.287

Fitri, Parawansa, J., Rahma, S., Muslim, K. L., & Nofra, D. (2018). Tokoh Pelopor Islam Di Sumatera Barat Pada Zaman Kolonial. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 16–23. anri.go.id

Groho, sigit sapto. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In *Hukum Waris Adat di Indonesia*.

Hallaq, W. B. (2000). *Sejarah Teori Hukum Islam (A History of Islamic Legal Theories)*. PT Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. M. (n.d.). *ضوابط تنزيل النص على الواقع*. Universitas King Faisal.

Hitou, D. S. binti H. (2023). *امتاع الاسماع فى شرح متن ابي شجاع-شفاء بنت محمد حسن هيتو.pdf*. Dar ad-Dhiya'.

Hitou, M. H. (2021). *Al-wajiz fi Ushul Tasyri' al-Islami*. Dar al-Musthafa.

Hololulloh, A. (2016). PIERRE BOURDIEU DAN GAGASANNYA MENGENAI AGAMA. *Citra Ilmu*, *24*(12).

Huda, Y. (2008). Debate about Inheritence Law and the Rise of Capitalism in Minangkabau. *Studia islamika*, *15*(2).

Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, *9*(1), 61–80. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282

Ilyas, A. (2019). *POLEMIK SAYYID USMAN BETAWI DAN SYEKH AHMAD KHATIB MINANGKABAU TENTANG SALAT JUMAT*. https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3194

Ilyas, A. (2024). *Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau dan Kontekstualisasi Syair Arab dalam Isbāt Al-Zain li Sulh Al-Jamā'atain*. https://doi.org/10.31314/ajamiy.13.1.54-70.2024

Ilyas, A. F. (2017). Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Dan Polemik Tarekat Naqsyabandiyah Di Nusantara. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, *1*(1), 86–112. https://doi.org/10.30821/jcims.v1i1.1008

Ilyas, A. F. (2019). Polemik Sayyid Usman Betawi Dan Syekh Ahmad Khatib

IAIN BONJOL PADANG

Minangkabau Tentang Salat Jumat. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, *2*(2), 239. https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3194

Imawan, D. H. (2021). MAHAGURU ULAMA NUSANTARA DI MAKKAH DAN RESPON ILMIAH TERHADAP PERMASALAHAN DI NUSANTARA ABAD KE 19- Muhammad Faiz. *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora*, *7*(2), 259–280.

Imawan, D. H., & Faiz, M. (2021). *Syaikh Ahmad Khatib Al-Minakabawi: Mahaguru Ulama Nusantara di Makkah dan Respon Ilmiah Terhadap Permasalahan di Nusantara Abad Ke 19-20 M*. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.142

Indrawati, N. N. (2016a). Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) Dalam Islamisasi Nusantara. *Jurnal Tamaddun*, *4*(1), 177–200.

Indrawati, N. N. (2016b). *PERAN SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI (1860-1916 M) DALAM ISLAMISASI NUSANTARA*. https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i1.940.g690

Iskandar, N. (2022). Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, *3*(3), 483. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8379

Junianto, V., Nursyahbani, I., & Al-Habsy, F. H. (2023). *Perbedaan Pendapat KH. Hasyim Asy'ari dan Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Sarekat Islam: Analisis Kitab Kafful Awwam dan Tanbihul Anam*. https://doi.org/10.36781/kaca.v13i2.465

Kasban, A. (2022). Nalar Hukum Islam Satria Effendi. *Al-Mabsut*, *16*(1), 23–44.

Kawakib, & Syuhud, H. (2021). INTERELASI AKAL DAN WAHYU : Analisis Pemikiran Ulama Mutakallimin Dalam Pembentukan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, *2*(1), 43–61. https://doi.org/10.24260/jil.v

Koto, A. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada.

Maisyaroh, M., & Iqbal, M. (2023a). Malay Ulama in Deli Land: The Life, Manuscripts, and Intellectual Networks of Shaykh Hasan Ma'sum (d. 1936). *Nahrasiyah: Journal of Aceh and Malay Archipelago Heritage*, *1*(1), 39–68.

https://doi.org/10.47766/nahrasiyah.v1i1.2038

Maisyaroh, M., & Iqbal, M. (2023b). *Malay Ulama in Deli Land: The Life, Manuscripts, and Intellectual Networks of Shaykh Hasan Ma'sum (d. 1936)*. https://doi.org/10.47766/nahrasiyah.v1i1.2038

Mochammad Sahid, M. (2018). Syeikh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi Dan Pendiriannya Terhadap Pewarisan Harta Dalam Adat Minangkabau: Satu Kajian Perbandingan Dengan Isu Tanah Adat Di Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *6*(1), 143–159. https://doi.org/10.33102/mjsl.v6i1.109

Murniwati, R. (2023). SISTEM PEWARISAN HARTA PUSAKO DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 103–111. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1

Naim, M. (1968). *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Sri Darma Nv.

Navis, A. A. (1986). *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. PT Temprint.

Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*. https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109

Noviarman, A. A., & Hasan, A. (2023). Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khatib Al- Minangkabawi Afif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(01), 169–177.

Nuha, U. (2022). العلاقة العلمية بين العلماء الجاويين والدولاة العثمانيين في القرن السادس عشر الميلادي الى القرن الثامن عشر الميلادي. *Islam nusantara*, *3*(Ii).

Nurul Hidayah. (2022). *Hermeneutika Dan Penafsiran*. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Piliang, E., & Sungut, N. D. M. (2017). *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Multimedia.

Pitlo, P. M. A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata Belanda* (4 ed.). PT INTERMASA.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Prasna, A. D. (2017). *Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))*. repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41801

Prasna, A. D. (2018). Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. In *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi* …. academia.edu. https://www.academia.edu/download/83366739/4402.pdf

Putri, R. L., & Suka'arsana, I. K. (2017). *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Waris Pusaka Tinggi menurut Hukum Waris Adat Minangkabau (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN Bts)*. 1–15.

Rasi'in, & Kultsum, U. (2024). *PEMIKIRAN PENDIDIKAN Biografi Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi*. *11*(01), 37–38.

Riva'i, A. A. (2021). PEMIKIRAN AHMAD KHATIB DAN ABDULKARIM AMRULLAH TENTANG HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, *11*(2), 151–163. https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.151-163

Ro'uf, D. A. M. (2018). *kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid al-Jabiri*. LKiS.

Rohmana, J. A. (2023). AL-MINANGKABĀWĪ ( DS 0003 00018 ): A Jāwī Ulama ' s Response to The Heterodoxy of Sufism ا سردم ناك يذلا ) اراتناسون-ويلالما ( يواجلا لماعلا بوتف لوح لاقلما اذه شقاني : صخللما مايف ، ) ٦١٩١-٠٦٨١ ( يوابكنلما بيطخ دمحأ خيشلا وهو ، نيشرعلا نرقلا قيادب في ةكم. *Al-tahrir*, *23*, 451–478.

Rosyadi, I. (2022). *Rekontruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. prenadamedia group.

Samsudin, Muthmainah, & Aidah, F. (2021). *Pengaruh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terhadap Organisasi Muhammadiyah pada 1903 - 1923*. Pusbangter Jatinangor.

Sati, A. D. T. (1962). *Tambo: Undang-Undang Minangkabau*.

Sholihin, M. (2021). *A SET ASPECT OF PAPER MONEY: A Reading on Ahmad*

*Khatib Al-Minangkabawi's Thought*. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol.5.iss1.art5

Sholihin, M., Shalihin, N., & Putra, A. (2021). *Paper money in Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi's thought: a comparative and critical commentary*. https://doi.org/10.1108/IES-10-2020-0043

Sudarto. (1997). *Metodologi Penelitian Filsafat* (2 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.

Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. PT Raja Grafindo Persada.

Syafrin, N. (n.d.). Konstruk Epistemologi Islam : *Tsaqafah*, *5*(2).

Syahnan, M., Asrul, A., & Ja'far, J. (2019). Intellectual Network of Mandailing and Haramayn Muslim Scholars in the Mid-19th and Early 20th Century. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, *9*(2), 257–281. https://doi.org/10.15642/teosofi.2019.9.2.257-281

Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam* (2 ed.). prenada media.

Syarifuddin, D. A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (1 ed.). PT Gunung Agung.

Syarifuddin, P. A. (n.d.). *Ushul Fiqh 1*. Logos.

Syarifuddin, P. A. (2008). *Ushul Fiqh 1* (5 ed.). Kencana Prenada Media Group.

Tamba, D. A., Gozaly, A. Y., Islam, U., Gunung, S., & Bandung, D. (2024). *Perbandingan dan Perbedaan Fikih Syirkah Pada Ulama Mazhab*. *x*(x), 151–169.

Thalib, S. (2000). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. sinar grafika.

Toeah, H. D. (n.d.). *Tambo Alam Minangkabau*. CV. Pustaka Indonesia.

Ulliyah, K., Aulia, E. N., Azka, M., Ikhsan, W., Ramadhani, R. F., Junaedi, M., & Aarde, T. Van. (2024). Perbedaan Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani dalam Pemikiran Islam. *Jurnal REVORMA*, *4*(1), 33–44.

Umar, M. C., & Riza, Y. (2022). Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/view/5733

UNIVERSITAS ISLAM PONJOL PADANG

Ummah, M. S. (2019). Takhrij hadis dalam kitab ad-da'i al-masmu' [UIN Syarif Hidayatullah]. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Viki Junianto, Nursyahbani, I., & Al-Habsy, F. H. (2023). Perbedaan Pendapat KH. Hasyim Asy'ari dan Syaikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Sarekat Islam: Analisis Kitab Kafful Awwam dan Tanbihul Anam. In *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* (Vol. 13, Nomor 2). https://doi.org/10.36781/kaca.v13i2.465

Wahidi, R., Halim, A., & Arifullah, M. (2024). *TAFSĪR AL-KHATĪB AL-MAKKĪ*. https://doi.org/10.30631/tjd.v23i1.436

Wirman, E. P. (2016). Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. *Jurnal Ulunnuha*, *6*(2), 161–175.

Wirman, E. P. (2019). *SYEKH AHMAD KHATIB AL-MINANGKABAWI; ICON THOLABUL ILMI MINANGKABAU MASA LALU UNTUK REFLEKSI SUMATERA BARAT HARI INI DAN MASA DEPAN*. https://doi.org/10.15548/JU.V6I2.598

Yunus, M. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Mahmud Yunus wa Dzurriyah.

Yusrolama. (2015). Konsep Dasar Hukum Waris di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Asy Syahriah*, *1*(1), 141.

Zakariya al-Anshari. (n.d.). *Ghayatul Wushul Fi Syarhi Lubb al-Ushul*. dar al-Kutub al-'arabiyah kubra.

Zarkasi, L., & Raffi, A. (2023). Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i. *Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa*, *1*(1), 1–11. https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162

Zuhaili, M. M. (2006). *al-Qawâid al-Fiqhiyyah wa Tatbîqâtuhâ Fî al-Madzâhib al-Arba`ah*. dar al-fikr.

UIN IMAM BONJOL
PADANG